

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 - 2022

Ferica Christinawati Putri¹, Ananda Aprillia Salsabila², Amanda Putri Salsabila Lubis³

Universitas Borneo Tarakan^{1,2,3}

Jl. Amal Lama No.Kel, Pantai Amal, Kec. Tarakan Tim., Kota Tarakan, Kalimantan Utara

e-mail: fericacputri@borneo.ac.id¹, anandasalsabila264@gmail.com²,

amandaputrisalsabilalubis@gmail.com³

ARTICLE INFO

Article history:

Received 12 February 2024

Recived in revised form 25 February 2024

Accepted 11 March 2024

Available online 31 Mei 2024

ABSTRACT

North Kalimantan Province as one of the regions is required to prioritize capital expenditure to support community economic activities. The Budget Realization Report (LRA) as a form of government accountability in managing finances shows priorities on government operational expenditures. The purpose of this study is to examine the financial performance of the Regional Government of North Kalimantan Province for Fiscal Year 2018 – 2022 using 5 data analysis tools consisting of: 1) Regional Financial Independence Ratio, 2) Growth Ratio, 3) Regional Original Revenue Effectiveness Ratio, 4) Regional Financial Efficiency Ratio, and 5) Compatibility Ratio. This research includes quantitative research with a descriptive approach derived from secondary data, namely the North Kalimantan Provincial Government Budget Realization Report 2018 – 2022. The results of the study using the ratio of regional financial independence showed the value of independence classified as consultancy

Keywords: Independence, Growth, Effectiveness, Efficiency, Compatimbility

Abstrak

Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu wilayah pemekaran diharuskan untuk mengutamakan belanja modal sebagai penunjang aktivitas perekonomian masyarakat. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola keuangan menunjukkan prioritas pada belanja operasional pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 – 2022 dengan menggunakan 5 alat analisis data yang terdiri dari: 1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 2) Rasio Pertumbuhan, 3) Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah 4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dan 5) Rasio Keserasian. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang berasal dari data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 – 2022. Hasil penelitian menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan nilai kemandirian yang tergolong konsultatif, rasio pertumbuhan pendapatan serta belanja menunjukkan kenaikan dan penurunan, rasio efektifitas PAD dapat dikategorikan efektif, rasio efisiensi keuangan daerah berada pada indikator efisien, serta rasio keserasian menunjukkan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2018 – 2022 masih mengutamakan belanja operasi dibandingkan belanja modal.

Kata Kunci: Kemandirian, Pertumbuhan, Efektifitas, Efisiensi, Keserasian.

Received 12 February, 2024; *Revised* 25 February, 2024; *Accepted* 11 March, 2024

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Otonomi Daerah memberikan adanya wewenang bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan sesuai dengan kehendaknya sendiri berdasarkan aspirasi rakyat namun tetap mengikuti peraturan perundang-undangan (Halim, 2007). Dalam menjalankan tanggungjawab sebagai pelaksana roda pemerintahan, diperlukan adanya penilaian kinerja keuangan untuk melihat kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan yang dilakukan pemerintah daerah setempat sudah efektif dan efisien dengan cara mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah (Astuti, 2015). selain itu, penilaian kinerja keuangan dibutuhkan oleh pengguna informasi keuangan sebagai salah satu pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi seperti bagi investor, pemerintah, masyarakat, karyawan, dan Lembaga keuangan. Namun, tidak semua pemangku kepentingan tersebut memiliki kemampuan untuk menginterpretasikan laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah dengan baik (Putri, 2022). Sehingga diperlukan adanya pengungkapan laporan keuangan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami untuk menghindari kesalahan dalam interpretasi (Hendriyani & Tahar, 2015).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 pasal 31 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan kepala daerah diharuskan untuk memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dalam bentuk Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Melalui LRA dapat diketahui kinerja keuangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah daerah otonomi baru yang terbentuk sejak adanya UU Nomor 20 Tahun 2012 tentang pembentukan provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi ke-34 di Indonesia. Sejak berpisah dari Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Kalimantan Utara memiliki kewajiban untuk memberikan inovasi dalam sistem pemerintahan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga dibutuhkan fokus belanja pemerintah dalam pembangunan fasilitas, sarana prasarana dan infrastruktur yang dapat meningkatkan produktivitas perekonomian bagi masyarakat Kalimantan Utara (Jaya & Dwirandra, 2014)

Kemampuan untuk pengelolaan anggaran yang baik menjadi tolak ukur pemerintah dalam menggali potensi daerahnya agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang berpengaruh terhadap pembiayaan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah (Tambuwun et al., 2014). Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah dengan menggunakan rasio keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio pertumbuhan, rasio efektifitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian (Mahmudi, 2019).

Berbagai penelitian telah dilakukan terkait dengan mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah antara lain Susanto (2019) melakukan penelitian tentang analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Mataram dan hasilnya adalah presentase tingkat efisiensi Kota Mataram masih kurang optimal dalam menekan biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan PAD. Selain itu, perhitungan pertumbuhan PAD pemerintah daerah Kota Mataram terus mengalami penurunan selama waktu perhitungan tahun anggaran. Sedangkan Sulisty (2018) memperoleh hasil kinerja keuangan pemerintah daerah Kalimantan Timur tahun anggaran 2009 sampai 2016 menunjukkan kinerja yang mandiri dikarenakan tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin kecil dan memiliki tingkat efektifitas PAD yang sangat efektif.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 – 2022”**

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan terhadap data – data keuangan yang telah dikumpulkan agar dapat memecahkan masalah dalam tujuan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara jika dilakukan perhitungan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian.

2.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Utara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti yaitu

purposive sampling dimana menentukan sampel dengan melakukan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017). Pertimbangan yang dilakukan oleh peneliti adalah ketersediaan data penelitian yaitu Laporan Realisasi Anggaran yang akan digunakan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara menggunakan rasio keuangan yaitu tahun 2018 – 2022.

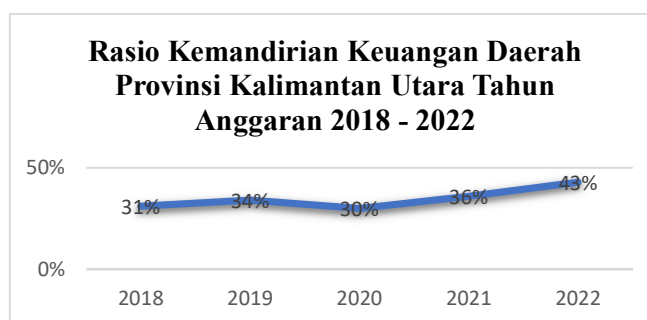
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 1. Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 – 2022

Tahun	Realisasi PAD	Pendapatan Transfer	RKKD (%)	Pola Hubungan
2018	574.088.357.593	1.825.311.428.438	31%	Konsultatif
2019	655.846.206.222	1.953.289.844.101	34%	Konsultatif
2020	557.646.133.462	1.846.607.658.007	30%	Konsultatif
2021	677.803.723.304	1.890.949.863.341	36%	Konsultatif
2022	815.664.188.996	1.908.970.208.199	43%	Konsultatif

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 2023 (diolah)



Gambar 1. Grafik Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 – 2022

Rasio kemandirian keuangan menunjukkan terjadi kenaikan dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 3% dan terjadi penurunan pada tahun 2020 sebesar 4%, dari tahun 2020 ke tahun 2021 kembali meningkat sebesar 6% dan mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2021 ke 2022 sebesar 7%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara tergolong pada pola hubungan konsultatif yang berarti Pemerintah Daerah memiliki kemampuan untuk melakukan pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah dengan sedikit lebih baik sehingga mengurangi tingkat ketergantungan dengan sumber-sumber eksternal yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

4.2 Rasio Pertumbuhan

Tabel 2. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 – 2022

Tahun Anggaran	Pendapatan Daerah	Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah
2019	2.610.072.420.323	8%
2020	2.435.451.724.804	-7%
2021	2.609.501.844.013	7%
2022	2.731.491.817.451	5%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 2023 (diolah)



Gambar 2. Grafik Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Secara keseluruhan pertumbuhan pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara mulai tahun 2018 – 2022 mengalami kenaikan dan penurunan. Terlihat pada gambar 4.3 pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan terendah yaitu dari sebesar 8% menjadi -7% sehingga penurunannya adalah 15%, kemudian mengalami pemulihan kembali peningkatan pendapatan daerah sebesar 7% dan pada tahun 2022 rasio pertumbuhan pendapatan yang didapatkan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5%. Jadi secara keseluruhan pertumbuhan pendapatan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2018 – 2022 tidak dalam kondisi yang stabil. Hal ini tercermin dari rasio pertumbuhan pendapatan yang naik dan turun secara signifikan selama 5 tahun berturut.

4.3 Rasio Efektivitas PAD

Tabel 3. Rasio Efektifitas PAD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 – 2022

Tahun Anggaran	Anggaran PAD	Realisasi PAD	REPAD(%)	Kriteria
2018	498.202.028.444	574.088.357.593	115	Efektif
2019	625.659.115.002	655.846.206.222	105	Efektif
2020	582.164.406.571	557.646.133.462	96	Tidak Efektif
2021	663.872.372.982	677.803.723.304	102	Efektif
2022	717.137.755.259	815.664.188.996	114	Efektif

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 2023 (diolah)

Berdasarkan tabel 3 kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara menurut rasio efektifitas selama tahun 2018 – 2022 seluruhnya dikategorikan efektif, kecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2018 rasio efektifitas PAD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebesar 115% dan tergolong dalam kriteria efektif. Kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 10% namun memiliki interval >100% sehingga tetap pada kriteria efektif. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 96% dikarenakan menurunnya realisasi pada pos-pos PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan juga lain-lain PAD yang sah. Kemudian, kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan juga 2022 sebesar 102% dan 114%. Jadi, secara keseluruhan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara berhasil mengoptimalkan pengelolaan PAD sehingga dapat mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya.

4.4 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Tabel 4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 – 2022

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	REKD(%)	Kriteria
2018	2.136.800.772.061	2.420.663.929.089	88	Efisien
2019	2.131.825.490.532	2.610.072.420.323	82	Efisien
2020	2.392.576.073.246	2.435.451.724.804	98	Efisien
2021	2.050.044.253.908	2.609.501.844.013	79	Efisien
2022	2.127.003.331.976	2.731.491.817.451	78	Efisien

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 2023 (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada rasio efisiensi keuangan daerah dapat diketahui bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara sejak tahun 2018 – 2022 termasuk dalam kriteria efisien karena memiliki rata-rata sebesar 85% atau tidak melebihi interval 100%. Interpretasi dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam merealisasikan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima oleh daerah.

4.5 Rasio Keserasian

Tabel 5. Rasio Belanja Operasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 – 2022

Tahun Anggaran	Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Operasi (%)
2018	1.499.079.084.484	2.136.800.772.061	70
2019	1.564.453.766.819	2.131.825.490.532	73
2020	1.727.405.179.222	2.392.576.073.246	72
2021	1.647.219.558.627	2.050.044.253.908	80
2022	1.629.460.884.903	2.127.003.331.976	77

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 2023 (diolah)

Tabel 6. Rasio Belanja Modal Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 – 2022

Tahun Anggaran	Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Modal (%)
2018	637.663.349.343	2.136.800.772.061	30
2019	567.371.723.712	2.131.825.490.532	27
2020	665.170.894.024	2.392.576.073.246	28
2021	390.900.388.868	2.050.044.253.908	20
2022	496.619.274.367	2.127.003.331.976	23

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 2023 (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan antara rasio belanja operasi dan belanja modal di atas menunjukkan prioritas alokasi dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara yaitu pada belanja operasional pemerintahan. Hal tersebut terlihat pada tahun 2018 persentase belanja operasi sebesar 70% sedangkan untuk belanja modal hanya 30%. Kemudian pada tahun 2019 rasio belanja operasi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 73% berbanding terbalik dengan belanja modal yang mengalami penurunan sebesar 27%. Pada tahun 2020 belanja operasi sebesar 72% dan belanja modal 28%. Selanjutnya, tahun 2021 belanja operasi mengalami peningkatan tertinggi selama lima tahun terakhir yaitu 80% dan belanja modal hanya 19%. Serta pada tahun 2022 belanja operasi menunjukkan persentase sebesar 77% sedangkan belanja modal 23%. Hal ini menunjukkan bahwa dari total belanja APBD lebih besar dialokasikan untuk belanja dengan manfaat yang dapat habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis, uraian pada hasil penelitian, dan pembahasan maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara menurut Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama tahun 2018 – 2022 mengalami kenaikan dan penurunan yaitu dengan persentase sebesar 31%, 34%, 30%, 36%, dan 43% sehingga termasuk dalam pola hubungan konsultatif. Dimana peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan pemerintah daerah dianggap cukup mampu dalam membiayai segala aktivitas pemerintahan secara mandiri. (2) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 – 2022 jika diukur menggunakan Rasio Pertumbuhan Pendapatan dan Pertumbuhan Belanja menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif. (3) Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara termasuk dalam kategori efektif karena berada pada interval >100%. (4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dikategorikan pada kriteria efisien yang artinya Pemerintah Daerah berhasil menekan belanja yang digunakan untuk menghasilkan Pendapatan Daerah. (5) Prioritas alokasi dana yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara sejak tahun 2018 – 2022 jika diukur menggunakan Rasio Keserasian menunjukkan bahwa belanja operasi merupakan dominan pengeluaran oleh Pemerintah Daerah jika dibandingkan dengan belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anton, F. (2010). *Menuju Teori Stewardship Manajemen*.
- [2] Astuti, W. (2015). *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan (Studi pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Periode 2007-2011)* (Vol. 6, Issue 1).
- [3] Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- [4] Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- [5] Hendriyani, R., & Tahar, A. (2015). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA. In *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* (Vol. 22, Issue 1).
- [6] Jaya, I. P. N. P. K., & Dwirandra, A. A. N. B. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7(1), 79–92.
- [7] Liando, G. Y., & Elim, I. (2016). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Maret*, 4(1), 1473–1484.
- [8] Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. STIM YKPN.
- [9] Putri, F. C. (2022). *Kondisi Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*. 11(2).
- [10] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- [11] Sularso, H., & Restianto, Y. E. (2011). *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*.
- [12] Sulistyono, A. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur*.
- [13] Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Distribusi: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 7(1).
- [14] Tambuwun, E. L., Pangemanan, S. S., & Afandi, D. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado. *EMBA*, 81–89.